



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : A. RAHMAT RESKI
NIK : 7324041904860001
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Unit Kerja : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sub Unit Kerja : BIDANG PENCEGAHAN
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 28 Februari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. RAHMAT RESKI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 242844

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	420.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/96 m2 di LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 420.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	---
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	5.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	19.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	444.500.000
III. HUTANG	Rp.	104.140.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	340.360.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : HENDRO PRABOWO
NIK : 7324041108810003
Lembaga : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Unit Kerja : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Kerja : BIDANG KEMITRAAN DAN PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
Jabatan : KEPALA BIDANG
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 26 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.